

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah suatu proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan kompetensi individu secara utuh. Selain itu pendidikan bukan hanya sekedar instrument pembelajaran, tetapi alat transformatif yang mampu mengubah nasib individu dan bangsa.¹ Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Pendidikan merupakan sarana yang paling strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya melalui peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Serta Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian.³ Karena di era digital yang cepat berubah, pendidikan harus terus berkembang menjadi lebih adaptif, relevan dan inklusif agar mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak, kreatif dan bertanggung jawab.

¹ Akhmad, A. (2020). "Perencanaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Globalisasi." SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2(2), 94-104. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/739>

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," Zitteliana 19, no. 8 (2003): 159-70.

³ Salsabila, U. H., et.al (2021). "Upaya dalam Memajukan Teknologi Pendidikan Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial: NUSANTARA*, 3(3), 442-458. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun>

Pendidikan saat ini sudah semakin berkembang dengan mengikutinya sebuah zaman yang ada, kurikulum pelatihan menjadi salah satu pedoman yang sangat penting bagi setiap instansi. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global. Dalam sistem pendidikan, kurikulum memegang peranan sentral sebagai perangkat perencanaan dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Kurikulum menjadi pedoman dalam proses pembelajaran yang mencerminkan tujuan pendidikan, isi materi, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan.⁴

Dalam konteks pendidikan dan pelatihan (diklat), kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai rencana pembelajaran, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membentuk kompetensi teknis dan profesional peserta diklat sesuai dengan kebutuhan institusi. Diklat yang terstruktur dengan kurikulum yang baik akan mampu meningkatkan efektivitas pengembangan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan organisasi pemerintahan dan militer seperti Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal tersebut menyakut pada pendidikan yang tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal saja, tetapi meluas ke berbagai ranah termasuk dalam pelatihan dan pengembangan pegawai di instansi pemerintahan. Dalam konteks instansi pemerintah, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi bagian strategis dari upaya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB VIII Manajemen ASN Pasal 70 ayat 1 menyatakan bahwa:

“setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Sedangkan pada Pasal 2 menyatakan bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran.”⁵

Pemerintah secara rutin melaksanakan berbagai jenis diklat teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi kerja pegawai. Namun, fenomena

⁴ *Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.*

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB VIII Manajemen ASN Pasal 70 ayat 1 dan 2. <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2014/5TAHUN2014UU.HTM>

umum menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan dalam Laporan Kinerja Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2023 bahwa mengindikasikan sebagian besar pelatihan masih bersifat administratif dan belum didesain berdasarkan kurikulum yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Namun, permasalahan terkait kurikulum diklat masih kerap dijumpai, seperti tidak sinkronnya antara tujuan pelatihan dengan materi ajar, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kurikulum, serta lemahnya manajemen dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.⁶ Selain itu, dinamika teknologi dan kebutuhan kompetensi yang terus berkembang menuntut manajemen kurikulum yang adaptif, responsif, dan inovatif.

Dampaknya tidak bisa dianggap sepele, kurikulum yang lemah akan menghasilkan pelatihan yang tidak efektif, menyebabkan rendahnya transfer kompetensi, menurunnya motivasi peserta, serta pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk pelatihan. Pelatihan yang seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan publik justru berpotensi menjadi beban birokrasi jika tidak ditangani dengan pendekatan kurikuler yang tepat. Dalam hal ini, perlu lebih memahami konsep manajemen kurikulum secara mendalam. Menurut Ibrahim Nasbi dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajemen kurikulum suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif.⁷

Manajemen kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan di instansi pemerintahan menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan pencapaian *output* dan *outcome* lembaga. Dengan manajemen kurikulum yang efektif, proses diklat dapat berjalan sesuai dengan tujuan, relevan dengan kebutuhan organisasi, serta memiliki daya guna jangka panjang. Dalam ranah diklat, manajemen kurikulum mencakup analisis kebutuhan pelatihan, perumusan kompetensi, pengembangan silabus, pemilihan metode, serta sistem

⁶ Saragih, A. H., & Suhendra, S. (2022). "Analisis Implementasi Kurikulum Diklat dalam Lembaga Pemerintahan". *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Aparatur*, 11(2), 101–117.

⁷ Nasbi, I. (2017). "Manajemen kurikulum: Sebuah kajian teoritis". *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4274>

monitoring dan evaluasi. Penelitian Hadi, dkk menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan dilihat dari proses perencanaan dan pengembangan suatu kurikulum agar berjalan sesuai dengan yang diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk mencapai tujuan organisasi.⁸

Kurikulum menjadi instrumen kunci dalam menjamin mutu pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan pedoman strategis dalam menentukan arah, isi, dan metode pelatihan.⁹ Maka dari itu, konsep tersebut sejalan dengan pendapat Eliana Sari didalam bukunya yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan satuan mata pelajaran yang dijadikan acuan bagi kegiatan pembelajaran, dimana diketahui juga bahwa tujuan pendidikan tertuang di dalam kurikulum.¹⁰ Kurikulum yang dirancang secara baik akan dapat menghasilkan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman.

Namun, dalam sebuah instansi pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) tentunya memiliki sebuah standar jika ingin melakukan diklat dimana standar tersebut berupa Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Hal ini dilakukan oleh setiap instansi pendidikan dan pelatihan dikarenakan agar dapat mengetahui yang akan dikerjakan kedepannya apakah dapat sesuai dengan rencana strategi yang dibuat dibidang tertentu atau tidak dan apakah rencana kerja ini bisa menjadikan pedoman kegiatan atau tidak. Adanya Renja dan Renstra ini menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sebelum mengupas lebih jauh pentingnya kurikulum dalam diklat, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan dalam konteks kelembagaan.

Menurut Fitriliana menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan dengan

⁸ Hadi, P. A., Rismawan, R., & Hidayat, A. N. (2023). "Peran Manajemen Kurikulum dalam Mengembangkan Kompetensi Peserta Didik di Lembaga Pelatihan Kerja Irma". *Journal on Education*, 5(2), 3485-3491. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1029>

⁹ Ansyar, M. (2017). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan*. (Jakarta: Prenada Media).

¹⁰ Sari, E. (2019). *Manajemen Lingkungan Sekolah: Implementasi Manajemen Pendidikan Pada Pengelolaan Lingkungan Sekolah*. (Sidoarjo: Uwes Publisher). h. 7

kemampuan, keterampilan, atau keahlian setiap pegawai, dengan upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berfungsi sebagai kegiatan pengenalan bagi yang bersangkutan ke dalam suatu pekerjaan tertentu.¹¹ Kemudian, Menurut Muhammad Ridha Albaar, et, al., menyatakan bahwa diklat adalah proses pembelajaran agar peserta dapat meningkatkan kompetensinya melalui pengetahuan dan penjelasan yang diberikan oleh pemateri serta dapat mempraktikkan langsung,¹². Pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena membantu individu tidak hanya memahami teori dan prinsip, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis di lapangan.

Dengan adanya kurikulum diklat yang memfasilitasi sebagai sarana pembelajaran di kelas untuk peserta diklat. Kurikulum juga menjadi landasan atau pedoman bagi widyaiswara dan pelatih di lembaga pendidikan dan pelatihan. Sementara itu melihat perkembangan zaman sudah semakin canggih dan mengikuti teknologi dipastikan bahwa bahan ajar atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran didalam kurikulum harus lebih modern. Intinya dari proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terarah dan terukur bagi peserta pelatihan. Maka, kurikulum pelatihan yang disusun tentunya harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang dibutuhkan, serta disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan peserta, pemangku kepentingan yang memanfaatkan lulusan, dan tujuan pelatihan yang diharapkan.

Kurikulum pendidikan menjadi alasan bahwa penting dilakukan karena menjadi sebuah pedoman dalam pembelajaran pendidikan. Beberapa organisasi melihat hal ini menjadi tantangan utama bagi para organisasi, dikarenakan harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi terkini. Dengan melakukan adaptasi tersebut, organisasi harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas

¹¹ Fitriliana, F., Mauliza, P., Hanum, F., & Juwita, J. (2022). "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh". *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 477-483.

¹² Albaar, M. R., Syahril, Z., & Syakdiah, H. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Diklat Teknis*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).

dan berkompeten dalam menanggapi sebuah perubahan. Hal ini dilakukan demi kelancaran pendidikan dan pelatihan agar memiliki acuan untuk melihat rencana secara terstruktur.

Berdasarkan hasil *Grand Tour Observation* (GTO) yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI). Peneliti menemukan informasi tentang manajemen kurikulum yang dilakukan di instansi tersebut. Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan merupakan instansi dibawah naungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, selain itu instansi ini juga melakukan diklat teknis dan fungsional bagi PNS Kemhan dan TNI, serta Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan bagi PNS Kemhan dan PNS dari instansi lain. Sebagai salah satu penyelenggara diklat sejak tahun berdiri yaitu tahun 2004 melakukan penyusunan kurikulum dengan kriteria dan pedoman yang seharusnya ditujukan untuk pelatihan. Salah satu pelatihan yang ada di instansi ini dapat menggunakan metode klasikal dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Implementasi penyusunan kurikulum diklat merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh pihak instansi untuk dapat merencanakan diklat selanjutnya, selain itu juga agar dapat mencapai tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum diklat pada instansi ini dilakukan beberapa bulan sebelum diklat dilaksanakan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Teknis Fungsional Pertahanan merupakan elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI). Sebagai institusi strategis, Pusdiklat Tekfunghan memiliki tugas utama untuk meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional para pegawai maupun personel militer. Dalam rangka mendukung tugas ini, keberadaan kurikulum yang dirancang dan dikelola dengan baik menjadi kunci utama untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan diklat.

Oleh karena itu, diketahui bahwa keunikan yang dimiliki oleh Pusdiklat Tekfunghan dibandingkan dengan Pusdiklat lainnya. Pusdiklat Tekfunghan merupakan sebuah lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi A oleh LAN RI dan sudah menjadi lembaga diklat yang berpedoman pada pelatihan militer baik itu dalam hal orientasi ataupun diklat-diklat lainnya. Sebagai lembaga dibawah naungan pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan memiliki peran strategis dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kurikulum yang efektif harus mampu mengakomodasi kebutuhan instansi, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta tantangan global yang semakin dinamis.

Namun, dalam pengelolaan kurikulum di Pusdiklat Tekfunghan memiliki permasalahan yang menjadi tantangan dalam lembaga pelatihan ini, yaitu masih kurangnya fleksibilitas dalam penyesuaian program dengan kebutuhan terkini dan bertentang antara bahan materi dengan pihak yang bersangkutan seperti pihak yang bekerjasama dalam diklat tertentu. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut kurang fleksibilitas seperti para pegawai yang berada di Pusdiklat Tekfunghan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru seperti saat ini. Disisi lain, Pusdiklat Tekfunghan ini dapat berkoordinasi lebih dengan berbagai tim yang terlibat dalam melakukan pengelolaan kurikulum diklat yang akan di manfaat bagi para peserta diklat. Serta perlunya penyesuaian kurikulum dengan perubahan kebijakan nasional dan internasional. Lalu, dapat memanfaatkan teknologi agar lebih melihat kebutuhan terkini atau updatean untuk dapat membuat bahan ajar (hanjar) itu selalu modern. Pusdiklat Tekfunghan memiliki fungsi untuk menyediakan penyelenggaraan diklat baik itu diklat teknis, fungsional, latsar CPNS, orientasi PPPK dan *workshop*.

Selain itu dalam proses penyusunan kurikulum dimulai dengan analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis*). Tim pengembang bekerja sama dengan para ahli untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya, materi pelatihan dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan pelatihan. Setelah itu, kurikulum

diujicobakan dan dievaluasi untuk memastikan relevansinya. Pengelolaan kurikulum melibatkan banyak pihak, termasuk kepala pusat Diklat, tim pengembang kurikulum, tenaga pengajar, instruktur, dan ahli materi dari Kemhan RI. Selain itu, *stakeholder* eksternal seperti pengguna lulusan juga memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum.

Oleh karena itu, adapun komparasi dengan temuan dari hasil observasi lembaga diklat lain yaitu Pusdiklat Kemenlu, Pusdiklat PKN BPK RI dan Deputi Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI. Dari hasil observasi kepada Pusdiklat Kemenlu dimana Pusdiklat ini memiliki beberapa bidang didalamnya bidang yang mengelola kurikulum diklat menyatakan bahwa di Pusdiklat Kemenlu ini tidak memiliki kurikulum diklat yang digunakan sebagai pedoman pelatihan dan pendidikan yang akan dilaksanakan. Selain itu di Pusdiklat BPK RI, dimana Pusdiklat ini memiliki kurikulum diklat yang digunakan sebagai pedoman pelatihan dan dilakukan secara sistematis. Serta pada Deputi Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, dalam hasil observasi peneliti bahwa Badiklat ini dalam instansinya itu masih kurang terhadap fokus dalam pengelolaan pembelajaran dimana diklat ini kurang fokus untuk memegang kurikulum yang ada di dalamnya untuk pelatihan disana.

Dengan adanya komparasi ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya keunggulan dari objek penelitian dimulai dari memiliki kurikulum diklat, pengelolaan yang masih terlihat ada dan digunakan dalam setiap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Selain itu dilihat dari jarak lokasi penelitian dengan keberadaan rumah peneliti lebih dekat dibandingkan dengan beberapa diklat yang ada. Serta Pusdiklat Tekfunghan memiliki keunikan tersendiri dikarenakan melakukan pendidikan dan pelatihan di lingkup pertahanan dan diklat yang dilakukan juga berbasis pertahanan negara.

Setelah melihat perbedaan atau komparasi manajemen kurikulum diklat di Pusdiklat Tekfunghan dengan lembaga diklat lainnya. Disini juga peneliti akan melakukan pendeskripsian tentang komparasi antara manajemen kurikulum yang ada di Tekfunghan dengan teori yang ada atau teori yang sudah

dipelajari oleh peneliti, mulai dari langkah yang dilakukan dalam manajemen kurikulum sampai dengan pemanfaatan yang diberikan kepada banyak orang atau khususnya peserta diklat. Berdasarkan teori yang sudah dipelajari bahwa manajemen kurikulum di Pusdiklat Tekfunghan ini sesuai dengan tahapan pada materi manajemen kurikulum, mulai dari komponen-komponen kurikulum, model, serta tahapan lainnya. Di Pusdiklat Tekfunghan ini menerapkan pengelolaan atau penyusunan kurikulum dilakukan 3 bulan sebelum diklat dilaksanakan, yang dimana dalam proses penyusunannya tidak terlihat terburu-buru. Selain itu juga, setelah melakukan proses penyusunan akan diadakannya sebuah rapat yang menjadikan kurikulum ini layak digunakan atau tidaknya.

Lalu, dapat dilihat dari beberapa penjelasan diatas mengenai permasalahan yang ada. Maka, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana proses pada manajemen kurikulum khusus pada lembaga diklat dapat meningkatkan pembelajaran yang efektif bagi peserta diklat di lingkup Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen kurikulum diklat diterapkan secara umum dan khususnya di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI. Dengan memahami praktik terbaik dan tantangan yang ada, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen kurikulum, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian misi Kemhan RI untuk mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan pertahanan di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan wawasan baru bagi instansi pemerintah khususnya lembaga diklat dalam mengembangkan kurikulum diklat sesuai dengan pedoman yang dimilikinya.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen kurikulum diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badiklat Kemhan RI, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun judul yang menjadikan penelitian ini adalah **“Manajemen Kurikulum Diklat di**

Pusdiklat Tekfunghan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pertahanan Kemhan RI”

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian terhadap Manajemen Kurikulum Diklat Di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI. Hal ini dapat memberikan gambaran pada sub fokus yang di ambil dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perencanaan Kurikulum Diklat Ditinjau dari Prinsip Demokratisasi dan Kooperatif di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI;
2. Pelaksanaan Kurikulum Diklat Ditinjau dari Prinsip Demokratisasi dan Kooperatif di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI;
3. Evaluasi Kurikulum Diklat Ditinjau dari Prinsip Demokratisasi dan Kooperatif di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI;

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus/sub fokus penelitian yang peneliti paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana Perencanaan (*planning*) Kurikulum Diklat Ditinjau dari Prinsip Demokratisasi dan Kooperatif di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?
2. Bagaimana Pelaksanaan (*actuating*) Kurikulum Diklat Ditinjau dari Prinsip Demokratisasi dan Kooperatif di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?
3. Bagaimana Evaluasi (*evaluation*) Kurikulum Diklat Ditinjau dari Prinsip Demokratisasi dan Kooperatif di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen kurikulum diklat dalam

meningkatkan kompetensi pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI yang diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan masukan bagi instansi untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kurikulum diklat selanjutnya agar lebih baik lagi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang manajemen kurikulum pendidikan dan pelatihan khususnya dalam peningkatan kompetensi pendidikan dan pelatihan melalui pendukung kurikulum diklat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau pemahaman yang efisien tentang penerapan kurikulum diklat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Tekfunghan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam studi tentang manajemen kurikulum pendidikan dan pelatihan lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Instansi

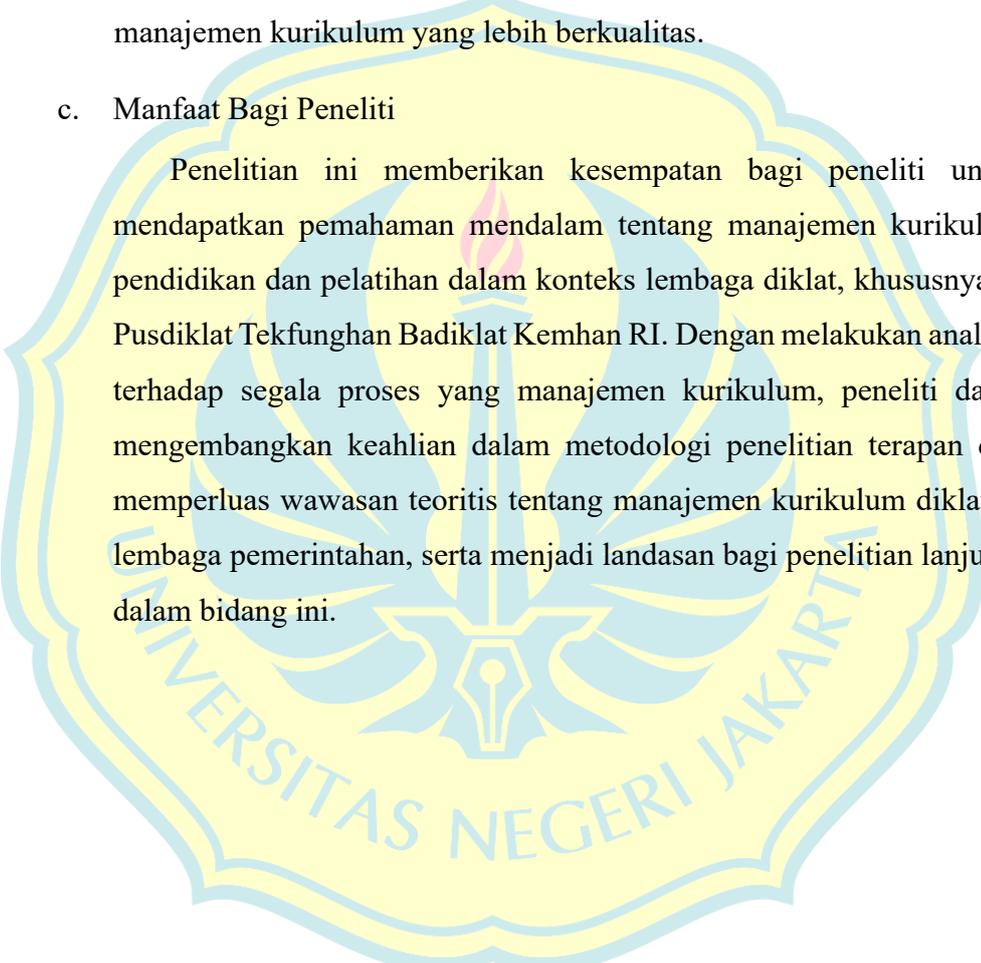
Peneliti dapat memberikan manfaat secara signifikan kepada Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, dalam hal penerapan manajemen kurikulum yang efektif dan efisien untuk dapat mendukung kualitas pendidikan dan pelatihan yang ada. Dengan melakukan analisis manajemen kurikulum yang ada, pusdiklat tekfunghan dapat memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana penerapan kurikulum diklat yang lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pendukung pembelajaran diklat. Implikasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilakukan oleh instansi untuk dapat meningkatkan penerapan kurikulum diklat sesuai dengan fungsi yang ada dan kegiatan yang dijalankan.

b. Manfaat Bagi Pembaca

Bagi pembaca yang membaca penelitian ini akan memberikan sebuah pemahaman atau pengetahuan lebih terkait manajemen kurikulum di lembaga pemerintahan khususnya lembaga pendidikan dan pelatihan. Dengan mempelajari studi ini, pembaca dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah terbukti meningkatkan manajemen kurikulum yang lebih berkualitas.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang manajemen kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam konteks lembaga diklat, khususnya di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI. Dengan melakukan analisis terhadap segala proses yang manajemen kurikulum, peneliti dapat mengembangkan keahlian dalam metodologi penelitian terapan dan memperluas wawasan teoritis tentang manajemen kurikulum diklat di lembaga pemerintahan, serta menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini.



Intelligentia - Dignitas